



JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i1>

Received: December 12th, 2023, Revised: February 4th, 2023, Publish: February 12th, 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksplorasi Pendidikan Inklusif: Kesetaraan dalam Pembelajaran

Saiful Bahri¹, Nuryati²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia, saifulbahri@unusia.ac.id

²Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia, nuryati9@gmail.com

Corresponding Author: nuryati9@gmail.com

Abstract: *Equality in learning at Kebangsaan Junior High School with an inclusive education approach. This research employs a qualitative method, including interviews, observations, and Focus Group Discussions (FGD) involving discussions with teachers and students at Kebangsaan Junior High School. The findings of this research indicate that gender equality issues remain a concern within the school environment. Students express experiences related to gender stereotypes, while teachers note challenges in implementing an inclusive approach. School administrators play a role in ensuring the success of inclusive education through supportive policies. To achieve the effectiveness of inclusive education, individual awareness, responsibility, mutual respect, and ongoing training for teachers and school staff are crucial. Thus, inclusive education aims not only to reduce gender discrimination but also to create a learning environment that is safe, comfortable, and supportive of cognitive development for students.*

Keyword: *Equality, Learning, Inclusive Education.*

Abstrak: Kesetaraan pembelajaran di sekolah SMP Kebangsaan dengan pendekatan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang meliputi wawancara, Observasi dan Fokus Grup Diskusi (FGD) yaitu berdiskusi dengan guru dan siswa SMP Kebangsaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender masih menjadi perhatian di lingkungan sekolah, siswa mengungkapkan pengalaman terkait stereotip gender, sementara guru mencermati tantangan dalam menerapkan pendekatan inklusif, kepala sekolah memiliki peran untuk menjamin keberhasilan pendidikan inklusif melalui kebijakan yang mendukung dan untuk mencapai efektivitas pendidikan inklusif, maka pentingnya kesadaran individu, tanggung jawab, dan saling menghormati dan melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya bertujuan mengurangi diskriminasi gender, melainkan juga membentuk lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan kognitif bagi peserta didik.

Kata Kunci: Kesetaraan, Pembelajaran, Pendidikan Inklusif

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara, di mana setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap kepentingan pendidikan inklusif dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaannya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang pantas dan berkualitas, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi (Budijanto & Rahmanto, 2021).

Menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa proses pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengakui keberagaman bangsa. Pasal 11 ayat 1 juga menyatakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan kemudahan, serta menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara, tanpa adanya perlakuan diskriminatif (INDONESIA, 2021). Adapun kebijakan dan program Kemendikbud Ristek tidak pernah membedakan gender karena semua memiliki hak yang setara, oleh karena itu jumlah peserta didik di Indonesia hampir seimbang di tingkat Sekolah Dasar (SD), 52,14% dari peserta didik adalah laki-laki, sedangkan 47,86% adalah perempuan. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 51,10% dari peserta didik adalah laki-laki dan 48,90% adalah perempuan. Sementara itu, di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), proporsi siswa laki-laki adalah 44,50%, sedangkan siswa perempuan mencapai 55,50% (Direktorat Sekolah Dasar, 2021). Oleh karena itu, dengan pendidikan inklusif mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi, demi menciptakan lingkungan di mana individu dapat memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakat yang adil dan setara melalui akses pemerataan wajib belajar 12 tahun.

Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender dicirikan oleh ketiadaan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peluang berpartisipasi, dan kendali terhadap pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai penggunaan dan produksi sumber daya tersebut. Memiliki kendali berarti memiliki penuh kekuasaan untuk membuat keputusan mengenai penggunaan dan hasil dari sumber daya tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan gender mengindikasikan tidak adanya lagi standarisasi peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki (Haslita et al., 2021).

Pendidikan inklusif merupakan aspek yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan di Indonesia (Luqmanul Hakim Muttaqin et al., 2023). Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan bagi seluruh anak, mencakup prinsip "*education for all*", dengan mewujudkan sistem pendidikan yang menghargai keragaman dan tidak menunjukkan tindakan diskriminatif, pendekatan inklusif juga bertujuan untuk merangsang perubahan dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penurunan nilai dan sikap diskriminatif (E. Setiawan & Cipta Apsari, 2019). Oleh karena itu, Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada perhatian yang semakin meningkat terhadap pentingnya memberikan peluang yang setara bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan lingkungan pembelajaran yang bersifat inklusif, di mana semua individu dapat belajar bersama, saling mendukung, dan mencapai potensi maksimal (H. Setiawan et al., 2020). Maka, dapat dikatakan pendidikan inklusif sangat penting di Indonesia, negara yang dianugrahi dengan keberagaman budaya, bahasa, dan lanskap geografis yang beragam.

Kemudian, kebijakan pendidikan inklusif bersifat top-down, artinya kebijakan ini idealnya diusulkan oleh sekolah sebagai penyelenggara, sehingga harus mempertimbangkan kesiapan sekolah (Fernandes, 2018). Pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang menyediakan akses kesemua siswa, termasuk yang kebutuhan khusus, agar dapat menerima pendidikan yang setara dan bermutu, dalam kerangka pendidikan inklusif dan kebebasan beragama dianggap sebagai salah satu aspek yang sangat relevan, tujuan dari pendidikan inklusif adalah untuk mencapai kesetaraan di antara siswa (Fransiskus Gultom & Marioga Pardede, 2023). Adapun tujuan lain dari pendidikan inklusif adalah untuk mengatasi tantangan global dalam memfasilitasi akses pendidikan, mendorong partisipasi seluruh pelajar, khususnya yang memiliki risiko untuk dikesualikan. Selain itu, tujuan tersebut juga mencakup memberikan peluang kepada mereka untuk mengembangkan keterampilan, dengan harapan dapat mengurangi risiko diskriminasi sosial (Kaulina et al., 2016).

Kemudian, upaya memastikan bahwa setiap orang tidak memandang asal usul, kemampuan, atau identitasnya, merasa diterima dan dihargai dalam konteks pendidikan. Sekolah diharapkan menjadi lingkungan di mana keragaman diakui sebagai kekuatan, bukan sebagai halangan (Amalia Fitri et al., 2023). Untuk itu pendidikan inklusif memerlukan penanganan lebih lanjut yang harus disikapi dan diselesaikan secara bersama agar tercipta kesetaraan dalam pendidikan dan untuk mencapai pendidikan inklusif, dibutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan. Sistem pendidikan harus melakukan perubahan dalam kebijakan, metode pengajaran, dan penilaian untuk memastikan pengakuan dan akses yang adil bagi semua individu.

Penelitian ini akan memfokuskan pada Pendidikan Inklusif yang mengacu pada kesetaraan dalam proses pembelajaran yang ada pada siswa. Sehingga, Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana menyampaikan pembelajaran secara relevan, menarik, dan dan apakah pendidikan inklusif memberikan siswa ruang aman dan nyaman saat pembelajaran dan tidak adanya diskriminatif sosial di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif wawancara, Observasi dan Fokus Grup Diskusi (FGD) melalui suatu diskusi kelompok mengenai suatu isu sosial atau spesifik, yang di pandu oleh moderator dan ada peserta yang diberikan kebebasan berpendapat, tidak ada penilaian benar atau salah sehingga interaksi saling menanggapi (Yanti B. Sugarda, 2020). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kebangsaan Tangerang Selatan, peserta terdiri dari guru, siswa kelas 7,8 dan 9. Penelitian ini fokus terhadap isu sosial yaitu bagaimana kesetaraan pembelajaran di sekolah SMP Kebangsaan dengan pendekatan pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) di sekolah SMP Kebangsaan dibuka secara terbuka oleh moderator dan mengungkapkan pertanyaan yang berkaitan dengan isu kesetaraan dalam pembelajaran, siswa mengekspresikan beragam pandangan. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa teman-teman sekelas pada umumnya menyadari pentingnya kesetaraan gender yaitu dengan tidak membeda-bedakan dan tanpa memandang jenis kelamin. Namun, sebagian siswa berpendapat bahwa masih ada stereotip gender, yang mempengaruhi pandangan tertentu terhadap siswa perempuan dan laki-laki di dalam pembelajaran maupun organisasi intra sekolah.

Stereotip gender merujuk pada pandangan atau keyakinan umum yang secara luas diterapkan terhadap peran, karakteristik, atau perilaku yang dianggap umum atau tepat untuk pria atau wanita dalam suatu komunitas. Ini melibatkan persepsi dan harapan umum terkait kemampuan, sikap, dan peran sosial yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin masing-masing, Misalnya seorang perempuan sering dianggap cenderung lemah, dan kurang

memiliki semangat untuk bekerja keras. Di sisi lain, laki-laki sering dianggap sebagai individu yang memiliki kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja keras (Lutfiyah & Kinanti, 2020). Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, prioritas utama adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas dan sekolah, dalam menjalankan pengelolaan kelas dan memfasilitasi pembelajaran yang dinamis dan inklusif di lingkungan sekolah, diperlukan keterlibatan berbagai komponen. Hal ini mencakup mencapai keseimbangan dalam pembelajaran mandiri, dukungan antar siswa melalui tutor sebaya, kolaborasi dalam kerja kelompok, dan penyampaian materi melalui pengajaran langsung (Ana Rafikayati & Lutfi Isnii Badiyah, 2018).

Kemudian, Fokus Grup Diskusi (FGD) siswa mengungkapkan tantangan dan pengalaman pribadi secara terbuka. Beberapa siswa perempuan berbagi pengalaman merasa kurang diakui dalam kegiatan akademis seperti olahraga, dan siswa laki-laki juga menanggapi pengalaman dengan memberitahu bahwa laki-laki juga merasa kurang diakui dalam pembelajaran memasak. Di sisi lain, guru juga memberikan pengalaman bahwa siswa masih memilih kelompok berdasarkan gender. Dapat disimpulkan bahwa, masih ada diskriminasi gender dalam pembelajaran dan hal tersebut tidak bisa di hilangkan namun bisa dicegah melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ranah pendidikan, keadilan sosial menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Dalam konteks pendidikan inklusif, keadilan sosial merujuk pada proses pendidikan yang menjadikan sistem, kebijakan, kurikulum, dan pusat pembelajarannya berfokus pada siswa dengan beragam latar belakang, sehingga terwujud pemahaman dan penghormatan saling-menyaling di antara mereka (Astuti & Sudrajat, 2020).

Selanjutnya, pada Fokus Grup Diskusi (FGD) guru berpendapat bahwa masih banyak sekolah yang belum menerapkan pendekatan inklusif karena sekolah itu beranggapan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran sekolah, namun pada kenyataannya dengan apa yang dirasakan siswa perlu dirasakan juga oleh tenaga pendidik tujuannya untuk meningkatkan kognitif siswa. Dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan memperhatikan kesetaraan gender tanpa melakukan diskriminasi. Guru kelas rata-rata menekankan perbaikan kualitas pembelajaran mereka dengan secara rutin menggunakan berbagai model atau media pembelajaran dalam pengajaran kelas (Saputri et al., 2022). Oleh karena itu pentingnya peran kepala sekolah yang memiliki dampak signifikan dalam mengambil keputusan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sekolah. Keberhasilan sekolah dapat tercermin melalui sikap dan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, termasuk dalam hal pengembangan staf pengajar, perancangan sistem, dan model pembelajaran yang mendukung pencapaian status sekolah ramah anak (Izzah et al., 2023).

Adapun kesimpulan Fokus Grup Diskusi (FGD) perlunya kesadaran individu, tanggung jawab dan saling menghormati dengan mendahulukan kepentingan bersama dengan tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, budaya dan jenis kelamin. Selain itu, program-program pendidikan telah diterapkan secara inklusif, memastikan ketidakberpihakan gender dari segi kurikulum, metode pengajaran, hingga proses evaluasi. Hal ini dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif terhadap gender (Abidin et al., 2022). Maka, perlunya kerja sama yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman tanpa diskriminasi gender, dalam pendidikan inklusif juga memerlukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan beragam peserta didik (Wahid, 2023).

Oleh karena itu, sekolah harus sadar akan program-program yang dicetuskan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi yang berkaitan dengan kesetaraan pendidikan seperti, program penguatan pengembangan peserta didik yang berkarakter, program merdeka belajar, program pembinaan implementasi kurikulum, dan program penghapusan tiga dosa besar. Dengan mengetahui program tersebut sekolah mampu

menjalankan pendidikan inklusif dengan baik dan perlunya kerjasama antara Pemerintah, Sekolah, Guru, Siswa dan Orang tua.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender masih menjadi isu di sekolah. Adapun siswa menyampaikan pengalaman mengenai stereotip gender, sedangkan guru menyoroti tantangan dalam menerapkan pendekatan inklusif. Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif melalui keputusan dan kebijakan yang mendukung, dalam rangka mencapai pendidikan inklusif yang efektif, perlu adanya kesadaran individu, tanggung jawab bersama, dan saling menghormati. Pelatihan serta pengembangan yang berkelanjutan bagi guru dan staf sekolah juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Oleh karena itu, pendidikan inklusif tidak hanya mengurangi diskriminasi gender, tetapi juga membentuk lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan kognitif bagi peserta didik.

REFERENSI

- Abidin, Z., Tobibatussa'adah, T., & Mujib, A. (2022). Praktek Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) di Lampung. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 7(2), 187. <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5836>
- Amalia Fitri, Mohammad Havis, Rayatul Akbar, Vira Adzkie, Pringgandani Al Asri, Novita Wulandari, Niken Cahya Rani, Tia Amelia Adha, & Vanesha Chintami Putri. (2023). Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial Sebagai Misi Sekolah di Era Society 5.0. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 1007–1012. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6612>
- Ana Rafikayati, & Lutfi Isn'i Badiah. (2018). *Pendidikan Inklusif* (S. Mambela, Ed.). Adi Buana University Press Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Astuti, D. S., & Sudrajat. (2020). Promoting Inclusive Education for Social Justice in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.037>
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Direktorat Sekolah Dasar. (2021, May 4). *Upaya Mewujudkan Kesetaraan di Dunia Pendidikan*. Ditpsd.Kemdikbud.Go.Id.
- Fernandes, R. (2018). ADAPTASI SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.16>
- Fransiskus Gultom, & Marioga Pardede. (2023). Dilema Pendidikan Inklusif: Akomodasi Kebebasan Beragama dan Pengarusutamaan Kesetaraan Siswa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 141–146.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3845>
- INDONESIA, P. R. (2021). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL* (1st ed., Vol. 4). Indonesia.
- Izzah, N., Setianti, Y., & Tiara, O. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272–284. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.236>

- Kauliņa, A., Voita, D., Trubina, I., & Voits, T. (2016). Children with Special Educational Needs and Their Inclusion in the Educational System: Pedagogical and Psychological Aspects. *Journal of Pedagogy and Psychology "Signum Temporis,"* 8(1), 37–42. <https://doi.org/10.1515/sigtem-2016-0015>
- Luqmanul Hakim Muttaqin, Muhammad Haekal, Ibrahim, & Ratna Tri Utami. (2023). Challenges and Strategies for Establishing Inclusive School In Indonesia: Aligning Islamic Values with Inclusive Education Principles. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam,* 12(3).
- Lutfiyah, L. Z., & Kinanti, K. P. (2020). Perbandingan Stereotipe Gender dalam Iklan: Kajian Semiotika Roland Barthes. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia,* 5(2), 211–220. <https://doi.org/10.32528/bb.v5i2.3349>
- Saputri, D. A. R., Ngazizah, N., & Anjarini, T. (2022). Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Kelas V. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN,* 4(2), 1735–1742. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2083>
- Setiawan, E., & Cipta Apsari, N. (2019). Pendidikan Inklusif: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Non Diskriminatif di Bidang Pendidikan Bagi Anak Dengan Disabilitas (AdD). *Sosio Informa,* 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Setiawan, H., Aji, S. M. W., & Aziz, A. (2020). Tiga Tantangan Guru Masa Depan Sekolah Dasar Inklusif. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual,* 5(2), 241. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i2.458>
- Yanti B. Sugarda. (2020). *Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode riset kualitatif.* PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, A. (2023). MULTIKULTURALISASI PENDIDIKAN ISLAM SEJAK DINI DI ERA DIGITAL. *ILJ: Islamic Learning Journal,* 1(3), 696–711. <https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v1i3.1041>